

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adhi Ardian Kustiadi, *Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*, Jakarta: TI, 2006.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amiruddin, "*Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*", Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Asri Sitompul, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Black's Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Minn: West Publishing, 1979.
- H, Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minesota.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- R. Shyam Khemani *et.al.*, "*A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*", Washington DC. And Paris: The World Bank and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 1999.
- Sacker dan Lohse, "*Law concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*", GTZ-Katalis Publishing, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung: Armico, 1996.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Cetakan Keempat, 1996.

Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung: Alumni, 1994.

TIM Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, hlm. 684.

Sumber Lain (Media Cetak):

Andi Fahmi Lubis, *et.al*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, 2009.

Gamawan Fauzi, “*International Seminar on Asian Good Practices to Fight Corruption*”, disampaikan oleh mantan Bupati Solo dalam presentasi Desember 2004.

Project Public Relations Activities in Support of Government’s Anticorruption Efforts, “*Tool Kit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*”.

Sekretaris Jendral MPR RI, “*Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*”, Jakarta: MPR RI, 2010.

Suara Karya, “*Persekongkolan Tender Pemerintah Kian Parah*”, 17 Oktober 2001.

Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, 1994.

World Bank, *World Development Report – The State in Changing World*, Washington, DC, World Bank, 1997.

Jurnal:

Aditya Purnama, *Tinjauan Yuridis Tentang Persekongkolan Tender (Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Jurnal Hukum.

Anna Maria Tri Anggraini, *Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan*

Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum, 2007.

Naoki Okatani, “*Regulations on Bid Rigging in Japan, The United States and Europe*”, Pacific Rim Law & Policy Journal, March, 1995.

Thomas S. Kaihatu., “*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*”, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Jurnal, 2006.

Transparency International Indonesia, “*Modul Pakta Integritas dan Sistem Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan Institusi/Lembaga Publik*”, 2003.

Yakub Adi Krisanto, *Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender*, Jurnal Hukum bisnis, vol. 24, No.2, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2005, hlm. 41-42.

Internet:

Baiq Dewi Yustisia, “*Pengadaan Barang oleh Pemerintah Melalui E-Procurement*”, <http://Adln.Lib.Unair.Ac.Id/>.

Bribe Payers index, Transparency International, Tahun 2002, http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi/complete_repore_bpi_2001#size.

Dodi Hendriyanto, *KPK Beberkan Modus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Di Merawang*, <http://www.transformasinews.com/2016/07/kpk-beberkan-modus-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-merawang/>.

<https://alamsyahprasetio.wordpress.com/2010/10/28/pelaksanaan-good-corporate-governance-di-indonesia/>.

<http://bahasapedia.com/pengertian-manfaat-prinsip-mekanisme-good-corporate-governance/>.

<http://hai-online.com/Kampus/Profile/Estimator-Adalah-Pekerjaan-Berbujet-Hingga-Miliaran>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-tender-definisi-lelang.html>.

<https://sites.google.com/site/operasiproduksi/estimasi-biaya-dan-penganggaran-proyek>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-estimasi/>.

<https://rumahukum.wordpress.com/2013/07/17/good-corporate-governance-perusahaan/>.

Vincentia Hanni, “*Ruwet, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*”,
<http://www.kpk.go.id>.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEPPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.